



APMD Press

Mengabdikan dan Melayani Desa

**Mutiara Pembelajaran Pengabdian Kepada Masyarakat
dari Kampus Desa**



**Prolog
Sutoro Eko**

**Editor
Fatih Gama Abisono**



APMD Press

Mengabdikan dan Melayani Desa

**Mutiara Pembelajaran Pengabdian Kepada Masyarakat
dari Kampus Desa**

Prolog
Sutopo Eko

Editor
Fatih Gama Abisano

MENGABDI DAN MELAYANI DESA

Mutiara Pembelajaran Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kampus Desa

Penulis:

Yonatan Hans Luter Lopo, Mohamad Firdaus, Irsasri, Fatih Gama Abisono
Reiki Nauli Harahap, Siti Sumaryatiningsih, Rema Marina, Aulia Widya Sakina
Hery Purnomo, Minardi, Kanita Khoirun Nisa

Prolog: Sutoro Eko

Editor: Fatih Gama Abisono

Co-editor: Yonatan Luther Lopo

Epilog: Gregorius Sahdan

Editor Bahasa: Irsasri

Desain Sampul: Reiki Nauli Harahap

Penerbit:

APMD Press

Jln. Timoho 317 Yogyakarta 55225

Cetakan Pertama 2020

xiv+194 hlm., 14,8 x 21 cm

ISBN: 978-623-91597-1-9

Hak cipta dilindungi undang-undang
(*all rights reserved*)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR EDITOR	iii
PROLOG “APMD” ADALAH “LSM BESAR”	vii
DAFTAR ISI	xiii

MELAHIRKAN DAN MENGAWAL UU DESA	
Oleh: Yonatan Hans Luter Lopo	1

ADVOKASI DAN ASISTENSI KEBIJAKAN	
Oleh: Mohamad Firdaus	17

MENJELAJAHI DESA MENGANGKAT	
KHAZANAH LOKAL	
Oleh: Irsasri	33

KKN: BERGAUL, BELAJAR, BEKERJA DAN BERDESA	
Oleh: Fatih Gama Abisono Nst	57

KEMITRAAN CSR UNTUK KEMAJUAN DESA	
Oleh: Reiki Nauli Harahap	75

JARINGAN, GERAKAN & PEMBELAJARAN	
BERDESA MULAI DARI PIKIRAN, PEMBELAJARAN,	
JARINGAN DAN GERAKAN	
Oleh: Siti Sumaryatiningsih	91

MENDAMPINGI BUMDESA, MERAJUT KORPORASI RAKYAT Oleh: Rema Marina	107
AKSI PEDULI DESA: MENGAMALKAN TRADISI “MUDA BERDESA” Oleh: Aulia Widya Sakina	123
EDUKASI DAN MEMAMPUKAN DESA Oleh: Hery Purnomo	135
MENDAMPINGI SELEKSI PERANGKAT DESA YANG BERMARTABAT Oleh: Minardi.....	149
MENYIAPKAN KADER PERUBAHAN DESA Oleh: Kanita Khoirun Nisa	163
EPILOG JALAN PANJANG MAHZAB TIMOHO: MELAYANI DAN MENGABDI PADA DESA Gregorius Sahdan.....	177
BIOGRAFI PENULIS	183

BAB 10

MENDAMPINGI SELEKSI PERANGKAT DESA YANG BERMARTABAT

Oleh: Minardi¹⁹

Saat pertama kali panitia seleksi perangkat desa memasuki kampus STPMD “APMD” untuk melakukan kerjasama, pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh pihak kampus adalah: “Apakah ada titipan yang nanti mau dijadikan (perangkat desa) atau tidak,? Jika ada titipan, silahkan Bapak dan Ibu keluar dari ruangan saya”, biasanya mereka lalu diam dan terbelalak.

Itulah penggalan percakapan antara Tim STPMD “APMD” dengan panitia seleksi perangkat desa. Memang pernyataan ini sungguh sangat kasar. Namun Tim STPMD “APMD” hendak menyampaikan pesan mulia dibalik pernyataan tersebut. Tim STPMD “APMD” mengajukan persyaratan agar seluruh pihak turut mengawal penyelenggaraan tes perangkat desa yang berintegritas. STPMD “APMD” tidak ingin merusak marwah desa, dan nama besar STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah hadir sejak 1965 untuk desa. Karena dari desa, Indonesia membangun. Desa harus dimuliakan dan dijaga bersama-sama.

19 Staf Pengajar Prodi S1 Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta. Penulis berterima kasih pada sejumlah narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu: Drs. RY Gatot Raditya, M.Si (Kepala P3M STPMD “APMD”), Drs. Suharyanto MM (Anggota PPK-APD STPMD “APMD”), Dr. Supardal, M.Si (Kepala PSKPPM STPMD “APMD”), Ali Yahya (Kepala Seksi Pemerintahan Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul), Sudarman (Kepala Seksi Pemerintahan Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul) dan Haryono (Dukuh di Desa Hargowilis, Kulon Progo).

A. Mengawal Penegakan Integritas Seleksi perangkat desa

Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang diakui dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Bagi seorang pemimpin pengakuan atas kepemimpinannya menjadi perihal pokok. Itulah legitimasi. Guna membangun legitimasi, proses rekrutmen pemimpin berintegritas sangat menentukan pengakuan tersebut. Untuk melahirkan kepemimpinan yang dibangun dengan legitimasi kokoh, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta turut memberikan kontribusi melalui Seleksi Perangkat Desa.

Di lingkungan STPMD “APMD” Yogyakarta memiliki tiga tim seleksi perangkat desa. Ketiga tim seleksi yaitu Pusat Studi Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat (PSKPPM), Pusat Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa “APMD” (PPK-APD) dan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M). Ketiga tim ini saling mengisi dan bekerjasama dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa di berbagai desa di DIY.

Tercatat, puluhan desa dari tiga kabupaten di Propinsi D.I. Yogyakarta yang mempercayakan tes seleksi perangkat desa kepada STPMD “APMD” Yogyakarta. Ketiga Kabupaten itu adalah Sleman, Bantul dan Kulon Progo. Sedangkan seleksi perangkat desa di Gunungkidul diserahkan kepada panitia seleksi perangkat desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa. “Di Gunungkidul ditangani sendiri dan tidak diserahkan pada pihak ketiga, “ ujar salah seorang personel PPK-APD Suharyanto.

Lalu bagaimana cara Tim-tim STPMD “APMD” Yogyakarta dalam menyiapkan dukungan bagi penyelenggaraan seleksi atau rekrutmen perangkat desa yang berintegritas? Tim STPMD “APMD” mendasarkan regulasi berupa peraturan daerah atau peraturan bupati yang ada. Sebab, masing-masing kabupaten memiliki pengaturan yang berbeda. “Dari tiga kabupaten yang desa-desanya telah menjalin kerjasama dengan Tim Penguji dijumpai perbedaan persyaratan maupun model seleksi. Setelah

calon lolos seleksi administrasi baru diijinkan mengikuti ujian yang modelnya juga variatif,” kata Suharyanto.

Kabupaten Kulon Progo mengatur seleksi hanya satu tahap yakni tes tulis saja. Tim STPMD “APMD” memiliki peran menyiapkan soal bergantung permohonan soal yang diajukan panitia. Urusan pendaftaran dan teknis penyelenggaraan ujian menjadi ranah panitia seleksi. Sedangkan regulasi Kabupaten Bantul dan Sleman lebih rumit karena melewati 4 hingga 5 tahap seleksi. Untuk seleksi perangkat di Bantul dan Sleman, tim STPMD “APMD” menjadi pelaksana ujian, setelah melakukan serah terima ujian dari pihak pemerintah desa kepada tim STPMD “APMD”. “Di Kulon progo lebih sederhana. kami hanya datang lalu menyerahkan soal, dan kami tunggu sampai ada terpilih, ” kata kepala P3M RY Gatot Raditya.

Integritas dalam membangun legitimasi telah dimulai sejak pertama kali pihak desa dan panitia seleksi memasuki Saat pertama kali panitia desa dan kepada desa serta Muspika memasuki kampus STPMD “APMD” Yogyakarta untuk melakukan kerjasama. Pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh pihak kampus adalah: *“Ada titipan tidak yang nanti mau dijadikan, salah satu peserta ini yang mau dijadikan nomor satu? Jika ada titipan, silahkan Bapak dan Ibu keluar dari ruangan saya dan mencari pihak ketiga yang lain”,* biasanya mereka lalu diam dan terbelalak.

Persyaratan tersebut mutlak dipenuhi oleh desa yang ingin bekerja sama dengan STPMD “APMD” dalam hal tes seleksi perangkat desa. Jika ada desa atau panitia seleksi yang memiliki agenda tersendiri di luar mencari pamong desa yang berintegritas, biasanya mereka mundur teratur. Namun kasus semacam ini sangat jarang terjadi. Umumnya, pihak pemerintah desa atau panitia seleksi menyambut perjumpaan awal tersebut secara positif terkait persyaratan yang diajukan oleh Tim STPMD “APMD” Mereka mengapresiasi terkait kenetralan APMD dalam tes perangkat desa. Sebab panitia seleksi juga mendapat manfaat dengan persyaratan

tersebut, mereka juga dipercaya oleh warga. “(Persyaratan) ini sebelum ada MoU antara APMD dengan kami. Kita juga enak, tidak ada beban, nanti jika ada yang mempertanyakan silahkan tanyakan kepada pihak ketiga yang menguji,” tutur Kasi Pemerintahan Desa Panggunharjo, Ali Yahya.

Hal serupa juga dialami panitia seleksi perangkat Desa Timbulharjo. Pihak desa dan panitia merasa nyaman atas cara yang dilakukan STPMD “APMD” dalam proses seleksi, khususnya saat awal pertama kali ke kampus. Timbulharjo selalu bekerjasama dengan STPMD “APMD”. Awalnya Kepala Desa Timbulharjo mengacu pada kampus APMD karena *concern* dengan desa. Di dalam benak Kepala desa setempat, untuk pengisian pamong itu lebih cocok di STPMD “APMD”, sesuai dengan namanya ada kata “Desa”. Kemudian, mereka menjajaki kerjasama dengan STPMD “APMD”. Di awal perjumpaan mereka sangat terkesan dengan syarat terkait menjaga integritas penyelenggaraan seleksi yang diajukan oleh tim STPMD “APMD”. “Jawaban kami atas syarat itu, jika kami punya kepentingan, maka tidak mungkin kami sampai sini berkali-kali,” ujar Kepala Seksi Pemerintahan Desa Timbulharjo Sudarman.

Upaya mengawal integritas penyelenggaraan seleksi perangkat desa memasuki tahap penyusunan soal ujian. Tim STPMD “APMD” biasaya akan mendistribusikan penyusunan soal kepada para dosen di STPMD “APMD” sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dosen. Dalam setiap tes seleksi perangkat desa, dosen yang terlibat bisa mencapai 7 hingga 8 dosen yang terlibat. “Soal ini kami share ke berbagai dosen. Misalnya soal tentang Pancasila tentu kita serahkan ke dosen yang mengajar pancasila,” kata Kepala P3M RY Gatot raditya.

Model semacam ini digunakan untuk mensiasati kebocoran soal. Karena tidak menutup kemungkinan ada peserta atau tim sukses peserta datang ke STPMD “APMD” Yogyakarta untuk mencari bocoran soal. Dengan model penyusunan yang

disebar semacam itu, kecil kemungkinan peserta dapat menembus tim untuk mendapat bocoran soal secara utuh. Bahkan saat soal dikompilasi oleh tim, soal tersebut masih diacak. Setelah soal selesai disusun, soal kemudian dikemas dalam bundel-bundel soal yang disegel. Penyegelan bundel paket soal ini penting dilakukan untuk memastikan soal tidak buka sampai pada saat pelaksanaan ujian.

Ada kisah menarik yang dilakukan oleh ketua panitia di sebuah desa untuk menguji integritas STPMD “APMD” Yogyakarta dalam komitmen tes seleksi perangkat desa. Kebetulan kediaman salah satu Tim STPMD “APMD” berada di desa yang tengah menyelenggarakan seleksi perangkat tersebut. Dengan dalih bersilaturahmi, ketua panitia ingin rumah anggota tim STPMD “APMD” tersebut. Namun, oleh yang bersangkutan sementara menolak kunjungan tamu dari desa yang tengah menyelenggarakan tes perangkat desa tersebut. Dia baru bersedia kembali menerima tamu, jika tes selesai digelar. Walaupun dengan dalih silaturahmi tanpa membahas tes perangkat desa, namun yang bersangkutan menjaga dari fitnah karena yang mendatangi adalah panitia seleksi perangkat desa. Ketua panitia seleksi tersebut semakin menaruh kepercayaan kepada STPMD “APMD” Yogyakarta.

Memasuki hari pelaksanaan ujian, soal pun dibawa sendiri oleh oleh Tim STPMD “APMD” Yogyakarta ke lokasi tes. Tim STPMD “APMD, benar-benar membawakan paket soal langsung dari kampus, tidak dibawa oleh panitia seleksi perangkat desa. Hal ini menunjukkan transparansi, karena soal benar-benar dibawa oleh tim STPMD “APMD” dan tidak sempat “mampir” ke tangan panitia seleksi. Soal kemudian dibuka dihadapan para peserta, kepala desa, perangkat desa, pimpinan kecamatan maupun masyarakat umum. Pada saat pelaksanaan ujian, sebelum soal dibagikan, tim STPMD “APMD” menunjukan soal masih dalam keadaan tersegel. Segel tersebut merupakan pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh pihak, bahwa soal yang diujikan telah dijamin kerahasiaannya sampai pada saat pelaksanaan ujian.

Setelah tahap demi tahap ujian diselesaikan, maka dilakukan koreksi hasil ujian. Uniknya, koreksi dilakukan secara terbuka. Proses koreksi secara teknis dilakukan oleh korektor dari Tim STPMD “APMD”. Kemudian disaksikan oleh peserta, panitia seleksi, pemerintah desa, perwakilan kecamatan, hingga warga. Prinsip keterbukaan itu artinya siapapun boleh mengikuti proses dari awal sampai akhir penyerahan hasil. Sehingga mereka tahu prosesnya. Salah seorang peserta tes Dukuh Klepu, Desa Hargowilis, Kulon Progo memberi kesaksian tes yang dilakukan tim STPMD “APMD” sangat transparan. Haryono yang kemudian lolos menjadi dukuh menambahkan, saat koreksi semua bisa saling mengawasi. “Yang mengkoreksi didampingi dari BPD, Muspika, disaksikan masyarakat umum, dan hasilnya dibacakan di depan umum,” kata Haryono.

Koreksi hasil ujian tes menjadi titik puncak dalam penyelenggaraan seleksi perangkat desa. Pada tahap ini sesungguhnya sangat rawan terhadap praktik-praktik kecurangan. Kecurigaan sangat mudah berkembang manakala proses koreksi berlangsung sangat tertutup, meski panitia tidak melakukan praktik kecurangan sekalipun. Apalagi jika praktik kecurangan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Kejanggalan-kejanggalan bisa saja ditemukan saat proses koreksi tertutup karena tidak dapat diawasi oleh publik. Atas dasar itulah, Tim STPMD “APMD” mengembangkan model penyelenggaraan tes perangkat yang transparan, karena terbuka untuk diawasi oleh siapapun.

B. Manfaat Menegakkan Integritas

Saat seleksi perangkat desa, kepala desa itu dan panitia seleksi menjadi yang paling banyak menerima tekanan. Mereka dipusingkan dengan banyaknya titipan kepentingan. Banyak pihak berkepentingan untuk meloloskan calon masing-masing. Belum lagi, jika kepala desa atau pemerintah desa terlibat dalam konflik kepentingan, karena memiliki “jago” tersendiri. Situasi tersebut

semakin rumit, manakala warga menghendaki proses seleksi yang terbuka dan transparan. Belum lagi supra desa yang diwakili kecamatan mengamanatkan agar proses seleksi diselenggarakan mengikuti aturan. Dilema pun muncul.

Tekanan semacam ini pun juga dialami oleh Tim STPMD “APMD” saat menjadi pihak ketiga dalam penyelenggaraan tes perangkat desa. Berdasar pengalaman, banyak pula calon atau tim sukses calon yang berupaya “menembus” barikade integritas Tim STPMD “APMD”. Mereka mencari “jalur-jalur belakang” dengan meminta bocoran soal dengan iming-iming imbalan tertentu. Tentu tawaran tersebut ditolak mentah-mentah. Tawaran pun dinaikkan. Namun Tim STPMD “APMD” tetap bergeming. Tim STPMD “APMD” menyadari jika mengambil tawaran tersebut sama dengan sedang mempertaruhkan nasib desa dan juga mempertaruhkan kredibilitas nama baik kampus desa.

Tekanan bahkan tidak berhenti sampai di situ. Pada saat hari pelaksanaan ujian, saat Tim tiba di lokasi ujian, beberapa kali Tim STPMD “APMD” disambut dengan aroma dupa dan kembang setaman. Dalam kepercayaan orang Jawa, dupa dan kembang sebagai medium dan simbol bekerjanya alam ghaib untuk mencapai tujuan tertentu. Namun Tim STPMD “APMD” tetap tegak lurus dan bergeming mempertahankan keyakinan untuk menjaga marwah desa serta menegaskan kredibilitas STPMD “APMD” yang berpihak pada desa.

Sketsa persoalan tersebut memberikan gambaran tentang sisik melik seleksi perangkat desa yang bermuara kepada diujinya integritas masing-masing pihak dalam penyelenggaraan tes perangkat desa. Pertanyaan berikutnya, apa untungnya menegaskan integritas? Apakah memberi manfaat jangka panjang bagi pihak-pihak yang terlibat. Dari pengalaman panjang STPMD “APMD” turut serta menyelenggarakan seleksi perangkat desa, terdapat sejumlah manfaat yang dapat dipetik yang akan dipaparkan sebagai berikut ini.

Menghasilkan Pamong Terpercaya dengan Legitimasi Kokoh

Di masa lalu, seleksi perangkat desa menjadi arena politik pedesaan yang tidak steril dari isu-isu kolusi dan bahkan suap. Akibatnya, kepercayaan masyarakat runtuh terhadap penyelenggaraan tes perangkat desa. Jika proses seleksi diselenggarakan dengan curang dan *sebrono*, maka siapapun yang lolos sebagai perangkat desa akan menghadapi persoalan ketidakpercayaan warga. Mereka yang terpilih akan menanggung gugatan yang dibangun dari rendahnya ketidakpercayaan warga. Kondisi demikian tentu sangat rentan bagi mereka yang terpilih karena miskin legitimasi. Sekalipun mereka yang terpilih memiliki kompetensi dan mumpuni, warga terlanjur tidak mengakui calon terpilih karena dilahirkan dari proses yang cacat.

Bagaimanapun juga proses seleksi perangkat desa bertujuan untuk menghasilkan perangkat-perangkat desa berkualitas. Jika proses seleksi dilakukan dengan tidak mengindahkan prinsip jujur dan adil, maka sesungguhnya desa tengah beresiko menghasilkan sosok yang tidak kompeten. Dalam proses demikian, mereka yang terpilih bukan karena telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan telah memenangi dalam setiap tahapan ujian. Namun, mereka yang terpilih karena adanya “permainan belakang” yang memberi jalan bagi terpilihnya orang-orang semacam ini.

Akibatnya, perangkat desa terpilih justru menjadi beban bagi desa. Disamping menghadapi persoalan pengakuan di masyarakat, sosok semacam ini juga tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk memperkuat pemerintahan desa. Mereka yang terpilih melalui “jalan belakang” sejatinya bukan calon yang terbaik. Ketika mereka mulai menjabat, visi pelayanan kepada warga tidak tampak kuat. Orientasi bekerja mereka cenderung melayani diri sendiri.

Guna memperbaiki situasi tersebut maka pihak pemerintah desa dan panitia seleksi mensiasati secara dinamis dengan menyelenggarakan pemilihan perangkat desa secara terbuka dan

transparan. Mereka juga bermitra dengan pihak ketiga yang kredibel dan terpercaya yakni perguruan tinggi yang *mumpuni* di bidangnya dengan tujuan meningkatkan kepercayaan penyelenggaraan seleksi perangkat desa. Perguruan tinggi yang dipilih tentunya, kampus yang berkomitmen untuk menyelenggarakan melakukan seleksi secara transparan seperti STPMD “APMD”. Dengan demikian, lahirnya perangkat desa yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta bukan “titipan” menjadi harapan baru bagi desa melalui penyelenggaraan seleksi perangkat desa.

Pada akhirnya, dampak keterbukaan proses penyelenggaraan tes perangkat desa meningkatkan kepercayaan terhadap hasil tes yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana yang dilakukan oleh STPMD “APMD”. Hasil seleksi perangkat desa yang transparan, akan memperkuat legitimasi kepada calon yang lolos seleksi. Bagi peserta tes yang tidak lolos menerima hasil tes dengan lapang dada dengan alasan memang demikian kemampuan mereka. Mereka yang tidak lolos juga mengakui keunggulan calon atau peserta yang meraih jabatan perangkat desa. “Karena ini hasil kompetisi sehat yang menunjukkan kompetensi masing-masing, maka jika mau marah, mau marah kepada siapa. Di Kulonprogo soalnya pilihan ganda semua,” kata Haryono.

Melalui berbagai tahap penyaringan yang sangat ketat diperoleh perangkat desa yang berkualitas sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Mereka diharapkan mampu bekerja membawa desa ke arah kemajuan yang menyejahterakan warga dengan spirit melayani warga. Mereka yang memiliki kapasitas, mereka pula yang biasanya lolos seleksi. Mereka yang lolos seleksi biasanya tidak jauh-jauh dari prediksi masyarakat umum. Biasanya, masyarakat umum sudah bisa menebak siapa yang akan lolos seleksi, dengan melihat kualitas pendidikan, rekam jejak, dan kiprah kemasyarakatan para calon. Hasil tes perangkat desa acapkali mengkonfirmasi keyakinan atau suasana kebatinan warga terhadap calon tertentu yang dianggap unggul oleh warga.

Sehingga calon “titipan” dan politik uang akan tidak berguna dalam model seleksi perangkat desa seperti ini.

Proses rekrutmen jabatan pamong desa yang transparan dan berintegritas, dimana setiap warga memiliki hak yang sama, menjadi dambaan warga hari ini. Seluruh warga dapat mengikuti seleksi, mengawasi proses pelaksanaannya, dan bisa mengetahui hasilnya. Warga merasa puas dengan hasil yang dicapai. Mereka juga mengakui siapapun calon yang memenangkan kompetisi telah melewati tahapan dan proses kompetisi yang jujur dan adil. Hal itu juga meminimalkan terjadinya gejolak pasca tes rekrutmen di masyarakat. Calon yang terpilih pun diakui karena memang mumpuni kemampuannya. Warga akan menaruh kepercayaan kepada peserta yang lolos seleksi. Karena mereka yang lolos bukan berasal dari “permainan belakang” yang berupaya memberi jalan bagi orang-orang dekat kepala desa.

Menjadi Lembaga Terpercaya Dalam Penyelenggaraan Tes Perangkat

STPMD “APMD” Yogyakarta yang sejak berdiri konsisten untuk memajukan desa-desa di Indonesia merupakan lembaga yang tepat untuk kegiatan tersebut. Sejak terbitnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan seleksi perangkat desa untuk berbagai formasi. Formasi tersebut antara lain sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan hingga kepala dusun.

Kepercayaan desa dan masyarakat umum kepada STPMD “APMD” Yogyakarta telah terbangun sejak lama. Model seleksi perangkat desa yang transparan membuat Tim STPMD “APMD” dicari oleh banyak desa. Pengalaman desa-desa yang telah bermitra dengan STPMD “APMD” Yogyakarta dalam seleksi perangkat desa, akan tersyiar sendiri ke desa-desa lain, sehingga desa-desa lain tertarik untuk bermitra/berkerjasama. “*Gethok Tular*” atau cerita dari mulut ke mulut tentang reputasi STPMD “APMD”

sebagai lembaga terpercaya dalam penyelenggaraan seleksi perangkat desa terus berjalan.

Sudah tidak terhitung STPMD “APMD” Yogyakarta menjadi mitra dalam tes/seleksi rekrutmen perangkat desa. Total desa yang pernah bekerjasama dalam seleksi perangkat desa tidak kurang dari 100 an desa, dengan ratusan formasi perangkat desa di tiga kabupaten di D.I. Yogyakarta, yakni Sleman, Bantul dan Kulonprogo. Alasan desa-desa di beberapa kabupaten di DIY bekerjasama dengan STPMD “APMD” antara lain agar seleksi perangkat desa lebih transparan, obyektif serta kapabel untuk memperoleh calon yang memiliki kualifikasi seperti yang diharapkan oleh desa.

Rata-rata setiap desa lebih dari dua kali mempercayakan seleksi perangkat desanya bersama kampus STPMD “APMD” Yogyakarta. Desa Panggungharjo misalnya, dari beberapa pengisian pamong, telah empat kali bekerja sama dengan Tim STPMD “APMD”. “Sampai saat ini tidak ada masalah dan yang dihasilkan pun ya Alhamdulillah berkualitas,” kata Ali Yahya.

Sekitar dua tahun yang lalu, Ketua DPRD Kulon Progo saat itu, Akhid Nuryati memuji kinerja Tim STPMD “APMD” dalam penyelenggaraan tes perangkat desa. Di sebuah situs laman berita, Akhid menyatakan kemampuan tim STPMD “APMD” sangat profesional dalam rekrutmen perangkat desa. Hal ini disebabkan karena pernah terjadi kekrisruhan di salah satu desa di Kulon Progo saat tes rekrutmen perangkat desa. Terindikasi terjadi kecurangan dengan adanya kunci jawaban soal yang tersimpan dalam *flashdisk* tidak berada satu tempat dengan *hardfile* kunci jawaban. Seleksi perangkat di suatu desa tertentu itu juga dinodai dengan adanya prosesi penandatanganan berita acara yang dilakukan sebelum tes selesai. Para peserta menilai itu janggal dan tidak ada dalam tata tertib.

Pihak ketiga yang dipercayakan membuat soal ujian oleh panitia juga dinilai tidak terpercaya. Lembaga terpilih yang menyelenggarakan seleksi perangkat desa dianggap tidak

profesional sehingga memunculkan kecurigaan di kalangan peserta maupun warga. Ketidakprofesionalan tersebut menjadi celah dan dapat mengurangi kepercayaan warga terhadap hasil tes perangkat desa. Hal ini juga menjadi catatan para anggota Dewan. Menurut Akhid Nuryati, Ketua DPRD Kulonprogo, sesuai azas kelaziman dalam pembuatan soal ujian perangkat desa haruslah dari lembaga yang kredibel. *“Biasanya dari lembaga pendidikan seperti APMD, tapi kalau ini (sensor), kami tidak tahu itu lembaga dari mana dan kredibilitasnya seperti apa,”* ujar Akhid.

Kesemua itu dibangun dari prinsip integritas dan profesional dalam penyelenggaraan tes perangkat desa. Bagaimana tim STPMD “APMD” membangun kapasitas profesionalnya dalam penyelenggaraan tes perangkat desa? Profesionalisme tim STPMD “APMD” dibangun dari pengalaman pembelajaran selama turut serta dalam menyelenggarakan seleksi perangkat desa. Pembelajaran yang didapat dari tes perangkat desa satu ke desa yang lain, justru semakin memperkuat kapasitas tim STPMD “APMD”. Setiap terdapat kasus baru menjadi pembelajaran yang menjadi rujukan pada seleksi perangkat desa berikutnya. Pembelajaran dari kasus ke kasus, semakin dan mengasah kematangan tim STPMD “APMD” dalam menyikapi tantangan penyelenggaraan seleksi perangkat desa.

C. Penutup: Mengabdi Tiada Henti

Sebagai kampus desa yang pada tahun 2020 ini genap berusia 55 tahun, STPMD “APMD” didirikan sebagai bentuk pengabdian kepada Desa. Kampus yang lahir pada tanggal 17 November 1965, STPMD “APMD” Yogyakarta lahir dari rahim eks-Tentara Pelajar yang membentuk Yayasan 17 Yogyakarta. APMD yang merupakan nama lama STPMD “APMD” Yogyakarta didirikan sebagai bentuk pengabdian dan balas budi dari eks-Tentara Pelajar kepada masyarakat desa. Karena sepanjang perang mempertahankan kemerdekaan, desa yang telah menolong perjuangan para

penjuang Indonesia saat itu, termasuk Tentara Pelajar. Pendirian institusi pendidikan ini sebagai bentuk pengabdian dan balas budi kepada desa. STPMD “APMD” Yogyakarta yang secara spesifik mencantumkan kata nama “Desa” di dalam nama kampusnya, dan itu satu-satunya di Indonesia. Hal itu merupakan bentuk keseriusan STPMD “APMD” Yogyakarta dalam turut serta dalam kepedulian terhadap desa.

Cerita tentang pelaksanaan seleksi perangkat desa, juga menjadi bentuk pengabdian kepada desa. Melalui seleksi perangkat desa, STPMD “APMD” berupaya memastikan desa memperoleh sumber daya terbaiknya. Ringkasnya, upaya tersebut tidak lepas dalam rangka mewujudkan perangkat desa yang kompeten, dan diterima oleh masyarakat. Kesaksian sebagian besar warga menyatakan puas dengan seleksi perangkat desa yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan STPMD “APMD”.

Upaya tersebut juga dibangun dari proses yang transparan dan berintegritas, agar tradisi berdesa dimana *mutual trust* menjadi fondasinya dapat dipulihkan. Hanya dengan membangun kepercayaan terhadap pemerintah desa oleh warganya, tradisi berdesa dapat tumbuh. Selama kepercayaan warga terhadap pemerintah desa belum tumbuh, tradisi berdesa sulit berkembang. Dengan seleksi perangkat desa yang berintegritas, STPMD “APMD” berupaya mengembalikan kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Transparan, profesional dan berintegritas menjadi nilai dasar yang diusung dalam penyelenggaraan seleksi perangkat desa. Itulah sekelumit proses seleksi perangkat desa menjadi ladang pengabdian kepada masyarakat civitas akademika STPMD “APMD” secara bermartabat.